

FAKTOR PENGHAMBAT PERANAN STAKEHOLDERS DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PERIKANAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ramona Prayoga Ramadhina^{1(a)}, Fitri Eriyanti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}ramonadina982@gmail.com, ^{b)}fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-04-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Faktor Penghambat,
Stakeholders, Pemberdayaan,
Industri Kecil dan Menengah
(IKM)

Keywords:

*Inhibiting Factors,
Stakeholders, Empowerment,
Small and Medium Industries
(SMI)*

Corresponding Author:

ramonadina982@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.978>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta validitas data diperiksa dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan pelaku IKM perikanan oleh para pemangku kepentingan antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, keterbatasan waktu, rendahnya motivasi pelaku IKM perikanan untuk mengikuti program pemberdayaan, serta kesulitan pelaku IKM dalam memenuhi standar atau persyaratan legalitas produk dari Budiman Swalayan.

ABSTRACT

This study aims to identify factors that hinder the role of stakeholders in empowering fisheries' small and medium industry (SMI) actors in Pesisir Selatan Regency. This research used a qualitative method with a descriptive approach conducted in Koto XI Tarusan Sub-district, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and data validity was checked using source triangulation techniques. The results showed that some of the factors that hinder the empowerment of fisheries SMEs by stakeholders include budget constraints, lack of human resources in the Trade and Transmigration Office as one of the main stakeholders, time constraints, low motivation of fisheries SMEs to participate in empowerment programs, and difficulties for SMEs in meeting the standards or product legality requirements of Budiman Swalayan.

PENDAHULUAN

Tambunan (2002) mengatakan bahwa IKM memainkan peran penting dan strategis untuk memajukan ekonomi nasional, khususnya penciptaan lapangan kerja dan penghasilan untuk masyarakat kurang mampu, menyalurkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Meski demikian, peran strategis IKM ini masih belum optimal, terutama di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang kaya akan sumber daya perikanan. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara potensi dan realisasi yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Menurut Cahyanti & Anjaningrum (2018) hal-hal yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis kecil di sektor industri pengolahan termasuk keahlian karyawan, cara produksi barang, cara mengelola uang, bagaimana melakukan pemasaran, kerja sama dengan pihak lain, serta kualitas fasilitas dan peraturan yang berlaku.

Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai terobosan dalam mengolah hasil perikanan yang akan mendorong ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi, pada kenyataannya selama ini para pelaku IKM belum bisa mengolah hasil perikanan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan secara maksimal. Meskipun IKM di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi melalui pengolahan hasil perikanan, faktanya bahwa mereka belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga menunjukkan adanya hambatan atau tantangan yang mendasar.

Menurut Efendi et al., (2019) permasalahan yang dihadapi IKM sehingga menghambat perkembangannya yaitu:

1. Kurangnya permodalan dalam mengembangkan usahanya;
2. Keterbatasan keterampilan maupun pengetahuan dalam mengembangkan usahanya;
3. Lemahnya relasi atau jaringan bisnis (*Business networking*);
4. Keterbatasan dalam mengakses pasar;
5. Kapasitas produksi terbatas.

Dalam bahasa Indonesia *stakeholder* artinya pemangku kepentingan. Freeman (1983) berpendapat bahwa *stakeholder* adalah orang atau kelompok yang bisa memengaruhi atau terpengaruh oleh perusahaan. Dan perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholder* dalam mengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah

seseorang, kelompok atau organisasi yang punya keperluan terkait dengan proyek ataupun inisiatif yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Dalam konteks IKM, ini berarti perlunya sinergi yang kuat antara pelaku IKM dan berbagai *stakeholders* untuk mengatasi kendala yang ada. Namun, masih ada kesenjangan dalam implementasi teori ini di lapangan, di mana banyak *stakeholders* yang belum memainkan perannya secara optimal dalam pemberdayaan IKM.

Menurut Ir. Hendra Hamid (2018) Pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada orang atau kelompok yang kurang kuat agar bisa mandiri, terutama dalam hal mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai proses memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu agar mandiri.

Di sisi lain, menurut Astuti dalam (Eriyanti, 2023) strategi yang dapat digunakan dalam memberdayakan masyarakat pesisir yaitu dengan mengembangkan akses pemasaran, permodalan, mengembangkan teknologi dan ukuran usaha perikanan, mengembangkan sarana prasarana yang dapat menunjang usaha perikanan, penguatan kelembagaan dan mengelola sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Hal ini merupakan langkah strategis yang dapat mendukung IKM dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Namun, perlu ada analisis kritis terhadap sejauh mana strategi-strategi ini telah diterapkan dan bagaimana hasilnya di lapangan.

Dalam pemberdayaan pelaku IKM, *stakeholders* memiliki peran penting untuk membantu pelaku IKM dalam mengembangkan bisnis/usahanya. Tentunya diperlukan peran dan sinergitas dari berbagai *stakeholders*. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala yang dialami *stakeholders* dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan pelaku IKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan jelas apa yang sedang diteliti dan menghasilkan data berdasarkan objek yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mendeskripsikan konteks dan dinamika yang kompleks terkait pemberdayaan IKM di

Kabupaten Pesisir Selatan. Maka dari itu, penggunaan metode penelitian ini cocok untuk mendeskripsikan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami kondisi dan interaksi yang terjadi di antara pelaku IKM, stakeholders, dan lingkungan sekitarnya. Pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja IKM. Wawancara dilakukan secara mendalam melibatkan sejumlah informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria pemilihan informan adalah keterlibatan aktif dalam kelompok, organisasi, atau permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi Wali Nagari, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, perguruan tinggi, mitra bisnis, dan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dan pertanyaan-pertanyaan disusun untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan pengetahuan informan tentang isu yang diteliti.

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi, laporan, artikel dan arsip yang relevan dengan pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen-dokumen ini memberikan perspektif guna melengkapi data dari wawancara dan pengamatan.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan antara informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan cara ini, maka dapat dilakukan verifikasi kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan fakta dan situasi yang ada di lapangan. Setelah itu, informasi tersebut kami cocokkan dengan dokumen-dokumen terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penghambat merupakan permasalahan atau tantangan yang dialami oleh para *stakeholders* dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor penghambat yang dialami oleh para *stakeholders* dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan berbagai tantangan 1 yang

mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing stakeholder yaitu:

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Disperindag Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai *stakeholders* primer yang harus dilibatkan secara penuh dalam seluruh fase kegiatan dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan Pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah keterbatasan anggaran, sumber daya untuk melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan serta kurangnya motivasi yang dimiliki oleh pelaku IKM itu sendiri.

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tanpa adanya anggaran yang cukup, program pemberdayaan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu Dinas Perdagangan dan Transmigrasi juga terkendala keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku IKM. Selain itu penghambat peranan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan juga tidak terlepas dari minimnya motivasi yang dimiliki pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Asyiah, dkk (2022) menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang menghadapi beberapa tantangan yaitu pertama, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Mereka tidak hanya memiliki sedikit tenaga kerja, tetapi juga kurangnya keahlian dalam mendukung UMKM, seperti kurangnya konsultan dan penasihat yang berkualitas.. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki. Dalam melakukan pemberdayaan tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan. Ketiga, kesulitan permodalan UMKM. Keempat, UMKM punya masalah teknis. Masalah-masalah ini biasanya tentang cara membuat barang, cara menjualnya, dan cara mempromosikannya. Sayangnya, para pelaku UMKM sering tidak terlalu

memperhatikan masalah-masalah teknis ini. Hal ini membuat pekerjaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang jadi lebih sulit untuk membantu UMKM berkembang. Dan tentunya, hal ini akan menghalangi perkembangan usaha UMKM.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmawati (2019) bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemerintah menghadapi masalah terkait anggaran, di mana distribusi anggaran sering kali tidak merata di seluruh daerah atau sektor. Daerah yang terpencil atau kurang berkembang cenderung menerima alokasi anggaran yang lebih sedikit, yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan guna memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hal ini bahwasanya organisasi sangat bergantung pada sumber daya internal untuk beroperasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menempatkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada posisi yang rentan, menghambat kemampuannya untuk melaksanakan program pemberdayaan secara efektif. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas yang lebih inovatif, seperti mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber daya.

Selanjutnya Siagian (1995) menggambarkan motivasi sebagai usaha untuk memberikan dorongan yang mempengaruhi individu agar memiliki keinginan dan kesediaan untuk mengarahkan kemampuannya, termasuk penguasaan, energi, dan waktu, dalam menjalankan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi kewajibannya, dengan tujuan mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Stephen P. Robbins (2003), motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan peningkatan, arah, dan disiplin individu untuk mencapai suatu tujuan. Stephen R. Covey (2004:105) menekankan bahwa motivasi intrinsik, yang berasal dari dalam diri seseorang, adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurutnya, pelaku usaha yang termotivasi secara intrinsik cenderung lebih gigih dan inovatif dalam menghadapi

tantangan. Dalam hal ini motivasi adalah dorongan yang mempengaruhi individu untuk mengarahkan kemampuan, energi, dan waktu mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Proses ini menghasilkan peningkatan, arah, dan disiplin dalam mencapai tujuan.

Namun, dalam hal ini motivasi dari pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masih kurang, sehingga menjadi penghambat peran *stakeholder* dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina Gartina, dkk (2019) bahwasannya hambatan yang dihadapi dalam memberikan bimbingan keterampilan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah yaitu kurangnya keikutsertaan kaum perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan tentang Usaha Kecil Menengah serta kurangnya kemauan kaum perempuan untuk mengembangkan motivasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa.

Wali Nagari

Wali nagari merupakan organisasi ditingkat daerah yang berperan dalam memimpin nagari. Tentunya Wali nagari memiliki peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan pelaku IKM perikanan. Adapun yang menjadi faktor penghambat wali nagari dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah masalah anggaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah pihak wali nagari terkendala dengan anggaran dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fremias Wenda, dkk (2021) Karena anggaran desa terbatas, kurangnya kualitas tenaga manusia, dan keterlambatan dalam pencairan dana ADD dan dana otsus menyebabkan program tidak terealisasikan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan terletak pada kemampuan kepala desa, tetapi lebih disebabkan oleh kendala teknis yang sering muncul di lapangan dan sulit diprediksi. Penelitian yang dilakukan oleh Fremis Wenda menjelaskan bahwa masalah anggaran yang terbatas sering kali disertai dengan keterlambatan pencairan dana, yang menghambat pelaksanaan program di tingkat

desa. Keterlambatan dan kekurangan anggaran dapat menyebabkan penundaan implementasi kebijakan dan program yang direncanakan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada efektivitas pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta pengembangan mekanisme manajemen keuangan yang lebih efisien di tingkat desa.

Akademisi

Keterlibatan akademisi sebagai pemangku kepentingan yang mendukung pemberdayaan memiliki kepentingan besar dalam menjalankan penelitian yang menghasilkan ide atau strategi dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan. Faktor penghambat oleh *stakeholders* akademisi dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah keterbatasan waktu pemberdayaan. Anggaran yang digunakan perguruan tinggi dalam melakukan pemberdayaan sering terlambat proses pencairannya. Keterlambatan cairnya anggaran membuat waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan menjadi terbatas, sehingga menghambat kelancaran dan efektivitas implementasi program.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ibnu Chudzaifah, dkk (2021) Program kerja perguruan tinggi dirancang dengan sebaik-baiknya, baik yang berhubungan dengan hal fisik seperti fasilitas bangunan maupun non fisik seperti kegiatan individu maupun kelompok. Namun sumber dana menjadi penghambat dalam melaksanakan program pengabdian karena dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan program.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat waktu. Keterlambatan anggaran dapat menghambat tahapan penting dalam proses pemberdayaan, sehingga mengurangi dampak program. Untuk mengatasi masalah ini, perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi yang fleksibel dan berkelanjutan dalam manajemen program pemberdayaan, termasuk upaya pemanfaatan waktu yang lebih efisien.

Mitra Bisnis

Budiman swalayan sebagai mitra bisnis berperan dalam memberikan akses pasar yang lebih luas kepada pelaku IKM dalam memasarkan produk-produk usahanya. Adapun

faktor penghambat peranan Budiman Swalayan dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan adalah karena pelaku IKM mengalami kesulitan dalam memenuhi standar atau persyaratan legalitas produk dari Budiman Swalayan, sehingga tidak semua pelaku IKM bisa memasukkan produknya ke Budiman Swalayan.

Menurut penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Nia Oktaviani, dkk (2022) bahwasanya izin usaha sangatlah penting bagi para pelaku usaha, dikarenakan dapat menjadi suatu perlindungan hukum, identitas dan dapat memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Ketika pelaku usaha sudah mendapatkan izin usaha maka mereka bisa menuliskan izin tersebut pada produk yang mereka jual. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli produk tersebut. Selain itu pelaku usaha juga dengan mudah dapat mempromosikan usahanya karena sudah memiliki legalitas usaha. Izin usaha ini tentunya juga dapat membantu pelaku usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

Akses ke pasar yang lebih besar memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan dan standar legal. Kegagalan pelaku IKM dalam memenuhi persyaratan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang regulasi pasar. Untuk mengatasi hambatan ini, pelaku IKM perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai legalitas usaha dan standar kualitas, serta didukung dengan fasilitas pendampingan untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh mitra bisnis seperti Budiman Swalayan.

PENUTUP

Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dilihat dari kendala yang dihadapi oleh masing-masing *stakeholders* dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa, faktor penghambat utama dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan terletak pada terbatasnya anggaran dana untuk melakukan program pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi serta Wali Nagari, sehingga pemberdayaan yang dilakukan belum optimal. Kemudian kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan pemberdayaan pelaku IKM serta kurangnya motivasi dari pelaku IKM juga menjadi hambatan bagi *stakeholders* dalam melakukan

pemberdayaan kepada pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Perspective on Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88–106.

DAFTAR PUSTAKA

Asyiah, S., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6695–6704.*

Fremias Wenda, Burhanuddin Kiyai, D. L. T. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1(2013–2014), 32.*

Cahyanti, M. M., & Anjaningrum, W. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 11(2), 73–79.* doi:10.32812/jibeka.v11i2.50

Gartina, N, R. R. Garis, and N Sunarti. 2019. “Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah.” *Jurnal Moderat 5 (3): 294–304.* <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

Chudzaifah, I., Hikmah, A. N., & Pramudiani, A. (2021). Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi dan Masyarakat dalam Membangun Peradaban. *AL-KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat, 1(1), 79–93.*

Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca

Covey, S. R. (2004). *Tujuh kebiasaan orang yang sangat efektif: Pelajaran dalam perubahan diri*. Free Press, p. 105-110

Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 504–511.*

Efendi, S., Guridno, E., Sugiono, E., & HS, S. (2019). *Penguatan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS

Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi, Jilid I*. Penerbit: PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.

Eriyanti, F. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Suatu Tinjauan Relevansi Faktor Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir)*. PT RajaGrafindo Persada.

Rochmawati, Alfi. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 3 No 11

Eriyanti, F. (2023). *Administrasi Negara dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Etnisitas*. PT RajaGrafindo Persada.

Siagian, Sondang, P. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Penerbit: PT Rineka Cipta Jakarta

Freeman, R. E., & David, L. R. (1983). *Stockholders and Stakeholders: A New*

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.